

DETERMINAN BELANJA SUBSIDI DAN BANTUAN SOSIAL TERHADAP KEMISKINAN DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

Martha Haessun Nassa^{1)*}, A. Zuliansyah²⁾, Zulaikah³⁾
¹²³Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
Email korespondensi^{1)*}: marthahaessunnassa@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh belanja subsidi dan belanja bantuan sosial terhadap kemiskinan di Indonesia secara parsial maupun secara simultan dalam perspektif ekonomi Islam. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif dengan teknik analisis regresi linier berganda (OLS) menggunakan data time series dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan. Populasi penelitian ini adalah belanja subsidi, belanja bantuan sosial, dan persentase penduduk miskin di Indonesia periode 2005–2024. Hasil penelitian secara parsial menunjukkan bahwa subsidi belanja tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan, sedangkan belanja bantuan sosial berpengaruh negatif dan signifikan, artinya peningkatan bantuan sosial mampu menurunkan tingkat kemiskinan. Secara simultan variabel belanja subsidi dan belanja bantuan sosial berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Indonesia. Dalam ekonomi Islam, temuan ini menegaskan peran negara melalui kebijakan fiskal yang berorientasi pada keadilan distributif dan takaful ijtima'i untuk mewujudkan kesejahteraan (falah).

Kata kunci: Kemiskinan, Belanja Subsidi, Belanja Bantuan Sosial, Ekonomi Islam.

DETERMINANT OF SUBSIDY EXPENDITURE AND SOCIAL ASSISTANCE TOWARDS POVERTY IN INDONESIA FROM AN ISLAMIC ECONOMIC PERSPECTIVE

Abstract

This study aims to analyze the effects of subsidy and social assistance spending on poverty in Indonesia, both separately and jointly, from an Islamic economic perspective. The method used in this study is a quantitative approach, employing multiple linear regression (OLS) on time series data from the Central Statistics Agency (BPS) and the Directorate General of Fiscal Balance (DJPK) of the Ministry of Finance. The population of this study is subsidy expenditure, social assistance expenditure, and the percentage of poor people in Indonesia for the period 2005–2024. The results of the study suggest that subsidy spending has no significant effect on poverty, whereas social assistance spending has a significant negative effect, indicating that increasing social assistance can reduce the poverty rate. Simultaneously, the variables of subsidy spending and social assistance spending have a significant effect on poverty. In Islamic economics, these findings emphasize the role of the state through fiscal policies oriented towards distributive justice and takaful ijtima'i to achieve welfare (falah).

Keywords: Poverty, Subsidy Spending, Social Assistance Spending, Islamic Economics.

PENDAHULUAN

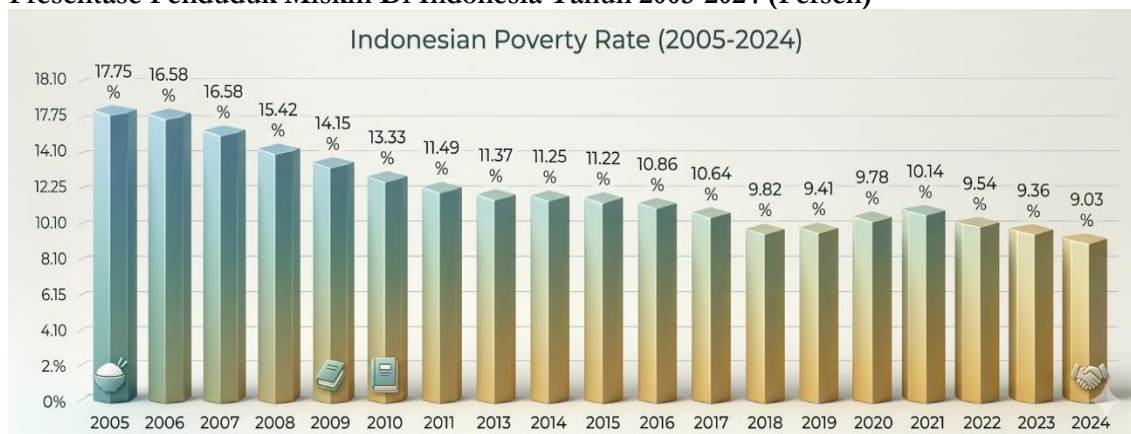
Kemiskinan adalah persoalan mendasar yang bersifat multidimensional dan menjadi tantangan berat bagi berbagai negara di dunia, termasuk Indonesia (Riyanta, 2018). Fenomena ini tidak hanya mencerminkan ketidakmampuan masyarakat dalam memenuhi

kebutuhan dasar, tetapi juga berkaitan erat dengan ketidakadilan distribusi sumber daya dan peluang ekonomi. Meskipun pemerintah telah meluncurkan berbagai program pengentasan kemiskinan, seperti bantuan sosial, pemberdayaan ekonomi, serta pembangunan infrastruktur, hasilnya sering kali belum sejalan dengan harapan karena adanya hambatan struktural. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa fungsi *takaful ijtima'i* (jaminan sosial) dan distribusi kesejahteraan belum berjalan secara optimal. Hal tersebut sekaligus menandakan bahwa laju pertumbuhan perekonomian di Indonesia masih belum sepenuhnya inklusif karena banyak masyarakat yang tertinggal dalam menikmati hasil pembangunan (Akbar, 2021). Islam memandang bahwa negara mempunyai tanggung jawab untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat melalui instrumen kebijakan yang berorientasi pada kemaslahatan, seperti distribusi kekayaan yang adil, bantuan sosial, subsidi, dan pemberdayaan ekonomi umat.

Indonesia adalah negara berkembang, 24% dari 240 juta penduduk masih hidup di bawah garis kemiskinan dengan pendapatan kurang dari 1 dolar AS per hari. Kemiskinan masih menjadi persoalan yang kompleks dan multidimensional, terutama di negara-negara berkembang (Priseptian & Primandhana, 2022). Kemiskinan sangat berkaitan dengan ketidakmampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan hidupnya (Normasyhuri et al., 2022). Dalam Islam, kondisi tersebut dipandang sebagai masalah yang harus diatasi melalui peran negara, masyarakat, dan instrumen redistribusi yang efektif agar tercipta keseimbangan sosial. Monzer Khaf memandang bahwa kebijakan fiskal Islam harus diarahkan pada peningkatan fungsi redistribusi melalui instrumen sosial seperti zakat, wakaf, subsidi, dan bantuan kepada kelompok rentan (Triana et al., 2025). Menurut Khomsan, kemiskinan dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa jenis: pertama, kemiskinan absolut, yaitu ketika pendapatan seseorang tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan pokok seperti pakaian, makanan, dan tempat tinggal. Kedua, kemiskinan relatif yang muncul akibat ketimpangan distribusi hasil pembangunan sehingga sebagian masyarakat tidak memperoleh manfaat secara proporsional. Ketiga, kemiskinan kultural, yang berkaitan dengan pola perilaku, sistem nilai, pola pikir, dan etos kerja yang berkembang dalam suatu komunitas. Terakhir, kemiskinan struktural, yakni situasi yang timbul karena adanya hambatan sistemik dalam struktur sosial, ekonomi, maupun politik yang membatasi akses individu atau kelompok terhadap sumber daya dan kesempatan (Khomsan et al., 2015). Dalam pandangan islam, keempat bentuk kemiskinan tersebut menuntut hadirnya kebijakan negara yang adil, amanah, dan berpihak pada kemaslahatan publik.

Gambar 1

Presentase Penduduk Miskin Di Indonesia Tahun 2005-2024 (Persen)



Sumber: Badan Pusat Statistik, (Data diolah 2026).

Gambar 1 menunjukkan bahwa persentase penduduk miskin di Indonesia pada tahun 2005–2024 cenderung mengalami penurunan dalam jangka panjang. Pada periode awal, tahun 2005 angka kemiskinan berada di 15,97%, kemudian sempat meningkat pada tahun 2006 menjadi 17,75% yang merupakan angka tertinggi selama periode pengamatan. Antara tahun 2007–2019, persentase penduduk yang hidup dalam kemiskinan turun dari 16,58% menjadi 9,41%. Lonjakan paling signifikan terjadi pada periode 2020–2021, dengan jumlah penduduk miskin mencapai 10,14%. Hal ini mencerminkan bahwa banyak keluarga yang kehilangan sumber pendapatan mereka karena pembatasan aktivitas ekonomi yang diberlakukan pemerintah untuk memerangi penyebaran virus (Sari et al., 2023). Selain itu, Magdalena et al. menyebutkan bahwa selama pandemi, banyak orang yang terpaksa bekerja dari rumah dan mengalami pengurangan pendapatan, yang berkontribusi pada peningkatan jumlah penduduk miskin (Magdalena et al., 2024). Pada periode 2022–2024 persentase penduduk miskin kembali menurun hingga mencapai 9,03% pada tahun 2024. Semakin menurun tingkat kemiskinan, maka semakin meningkat pula tingkat kesejahteraan masyarakat (Shelisa & setyanto, 2023).

Dalam perspektif Islam, kemiskinan dipandang sebagai kondisi yang berpotensi mengancam kualitas akhlak, kejernihan nalar, ketahanan keluarga, serta stabilitas sosial. Kemiskinan tidak sekadar persoalan ekonomi, melainkan juga problem serius yang dapat memengaruhi dimensi keimanan, moralitas, pola pikir, perkembangan peradaban, keharmonisan rumah tangga, hingga tatanan kehidupan manusia secara luas. Atas dasar itu, Islam menempatkan kemiskinan sebagai persoalan fundamental yang menuntut penanganan dan solusi yang komprehensif (Rahman & Siradjuddin, 2020). Kemiskinan adalah masalah umum dan perlu diatasi bersama oleh berbagai pihak, dan pemerintah memiliki peran besar dalam pengentasan kemiskinan (A. Zuliansyah et al., 2022). Salah satu faktor yang berperan penting dalam penanggulangan kemiskinan adalah belanja pemerintah. Pengurangan tingkat kemiskinan merupakan salah satu sasaran utama dalam agenda pembangunan nasional (Rosa & Ananda, 2024). Teori Keynes mengemukakan bahwa pengeluaran pemerintah dapat meningkatkan permintaan agregat. Ketika pemerintah menaikkan belanja publik, baik melalui investasi infrastruktur, pendidikan, ataupun pengeluaran sosial, hal ini bisa menciptakan peluang kerja dan meningkatkan pendapatan di masyarakat (Nunes, 2024).

Pendapatan merupakan faktor yang menentukan kesejahteraan masyarakat, sejumlah pakar berpendapat bahwa belanja pemerintah merupakan instrumen strategis yang efektif dalam menekan ketimpangan distribusi pendapatan sekaligus mengurangi tingkat kemiskinan (Anderson et al., 2018). Menurut Mankiw Kemiskinan merupakan persoalan yang kompleks dan menjadi tantangan besar bagi para perumus kebijakan dalam merancang solusi yang efektif dan berkelanjutan (Mankiw et al., 2012). Belanja subsidi dan Bansos terbukti memiliki dampak signifikan terhadap kemiskinan, khususnya bagi kelompok masyarakat yang kurang mampu dan rentan. Subsidi, baik dalam bentuk bantuan langsung tunai, subsidi pangan, maupun subsidi energi, bertujuan untuk meringankan beban biaya hidup masyarakat miskin (Putra & Anzaikhan, 2022).

Gambar 2 menunjukkan perkembangan belanja subsidi di Indonesia pada periode 2010–2024 yang berfluktuasi dengan kecenderungan meningkat dalam jangka panjang. Jumlah subsidi paling rendah tercatat pada tahun 2006 sebesar 107.431,79, kemudian mengalami kenaikan yang cukup pesat hingga mencapai titik tertinggi 391.962,50 pada 2014. Selanjutnya, pada 2015 nilai subsidi menurun tajam menjadi 185.971,10, sebelum kembali meningkat secara bertahap, terutama pascapandemi, yaitu tahun 2021 sampai

tahun 2024 hingga mencapai 292.472,78.

Gambar 2

Realisasi Belanja Subsidi di Indonesia tahun 2005-2024 (Miliar Rupiah)



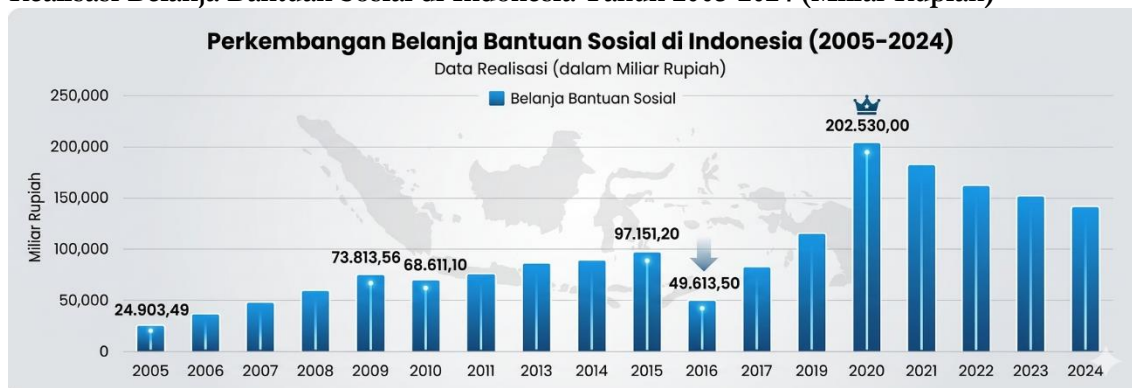
Sumber : DJPK (Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan), (Data diolah 2026).

Insentif yang diberikan dalam bentuk subsidi energi dan bahan pangan tidak hanya bertujuan untuk mendukung masyarakat, tetapi juga untuk merangsang permintaan domestik serta mempercepat proses pemulihan ekonomi (Hoekman, 2020). Perubahan harga energi global juga menjadi salah satu penyebab utama lonjakan dalam belanja subsidi. Ketika harga energi meningkat, penyesuaian subsidi menjadi penting untuk mencegah lonjakan biaya hidup, yang dapat secara langsung mempengaruhi konsumen (Alwi, 2023).

Bantuan sosial adalah salah satu instrumen anggaran yang digunakan pemerintah untuk menurunkan angka kemiskinan di Indonesia. Program ini disalurkan dalam bentuk uang tunai, barang, maupun layanan tertentu dengan tujuan melindungi masyarakat berpenghasilan rendah dari berbagai risiko sosial sekaligus mendorong peningkatan kesejahteraan mereka secara bertahap (Alamanda, 2020). Pemerintah dalam upayanya menekan tingginya tingkat kemiskinan yaitu melalui peningkatan efektivitas penanggulangan kemiskinan, yakni dengan melaksanakan berbagai upaya penanggulangan kemiskinan diwujudkan melalui berbagai kebijakan, antara lain program perlindungan sosial seperti JAMKESMAS, RASKIN, BSM, PKH, inisiatif pemberdayaan masyarakat melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) dan bantuan untuk pertumbuhan usaha mikro melalui Kredit Usaha Rakyat (Habibah et al., 2020). Menurut Saeed pemerintah di berbagai negara kerap menyalurkan bantuan tunai sosial kepada masyarakat dengan beragam tujuan, antara lain untuk menjaga stabilitas konsumsi rumah tangga, menurunkan tingkat kemiskinan, serta mendorong pemanfaatan layanan pendidikan dan kesehatan, dan sasaran sosial lainnya (Saeed & Hayat, 2020).

Gambar 3

Realisasi Belanja Bantuan Sosial di Indonesia Tahun 2005-2024 (Miliar Rupiah)



Sumber : DJPK (Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan), (Data diolah 2026).

Pada Gambar 3 menunjukkan bahwa belanja bantuan sosial di Indonesia periode 2005–2024 cenderung meningkat, meskipun mengalami fluktuasi. Pada 2005–2009 terjadi peningkatan bertahap yaitu dari 24.903,49 menjadi 73.813,56, diikuti penurunan 68.611,10 pada tahun 2010. Pada tahun 2011–2015 terjadi peningkatan bertahap dari 71.104,30 menjadi 97.151,20, tetapi kemudian turun tajam menjadi 49.613,50 pada 2016. Kemudian kembali meningkat hingga mencapai puncak 202.530,00 pada 2020. Hal ini terjadi karena adanya berbagai upaya pengentasan ekonomi serta pemutusan hubungan kerja (PHK) yang membuat bantuan sosial disalurkan kepada masyarakat. Namun belanja bantuan sosial mengalami penurunan pada tahun berikutnya. BPS menyampaikan bahwa alokasi anggaran belanja bantuan sosial untuk penanggulangan kemiskinan setiap tahun mengalami peningkatan sekitar 0 hingga 2 persen. Namun, dana tersebut masih belum digunakan sesuai dengan tujuan. Program bantuan sosial bagi masyarakat miskin meliputi Bidikmisi, Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Sosial Rastra, dan lain sebagainya. Menurut Nurias meskipun terdapat peningkatan dalam porsi anggaran untuk program-program sosial, pengurangan angka kemiskinan tidak selalu berbanding lurus dengan kenaikan belanja tersebut (Nurias et al., 2023).

Dalam perspektif ekonomi Islam, belanja publik idealnya diarahkan untuk mencapai masalah (kemaslahatan umum), keadilan distributif, dan peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat. Prinsip maqashid syariah menekankan bahwa pengelolaan keuangan negara harus mampu memenuhi kebutuhan dasar manusia, melindungi kelompok rentan, serta menciptakan pemerataan. Dijelaskan dalam Surah An-Nisa [4] ayat 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: “*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat*”. (QS An-Nisa Ayat 58).

Berdasarkan ayat tersebut dapat dipahami bahwa terdapat hubungan yang erat antara kebijakan yang ditetapkan pemerintah dan tingkat kesejahteraan masyarakat. Ayat tersebut menekankan urgensi amanah dan keadilan dalam penetapan hukum sebagai dua prinsip mendasar dalam tata kelola kepemimpinan yang ideal. Dengan demikian, negara memerlukan figur pemimpin yang dapat dipercaya dan berintegritas dalam merumuskan serta melaksanakan kebijakan demi terwujudnya kemaslahatan publik (Zahid et al., 2025). Prinsip keadilan dalam ayat tersebut terefleksi dalam kebijakan fiskal melalui distribusi belanja subsidi dan bantuan sosial yang tepat sasaran guna menjamin penyediaan kebutuhan dasar kelompok *mustadh'afin* (rentan).

Secara teoritis, peningkatan belanja sosial seharusnya mampu menurunkan tingkat kemiskinan, baik secara langsung maupun dalam jangka panjang. Berdasarkan data pada Gambar 1, 2, dan 3 terlihat bahwa sepanjang tahun 2005–2024 pengeluaran pemerintah meningkat, khususnya pada periode 2020–2022 dikarenakan pandemi COVID-19. Idealnya, dengan bertambahnya pengeluaran tersebut, jumlah penduduk miskin di Indonesia menurun. Meskipun banyak penelitian yang membahas pengeluaran pemerintah terhadap kemiskinan, terdapat kesenjangan penelitian (*Research gap*) yang nyata. Hasil penelitian (Sayyidina et al., 2023), (Adegboyo, 2020), dan (Zaki et al., 2023) yang menyimpulkan bahwa pengeluaran pemerintah berpengaruh signifikan dalam menurunkan tingkat kemiskinan. Namun, hasil penelitian (Nurias et al., 2023), (Piffaut et al., 2022), dan

(N. I. Sari, 2018) menunjukkan bahwa belanja pemerintah tidak berpengaruh signifikan terhadap penurunan kemiskinan. Kondisi tersebut mengindikasikan adanya perbedaan hasil empiris yang belum sepenuhnya sejalan dengan teori pengentasan kemiskinan. Novelty penelitian ini terletak pada penggunaan perspektif ekonomi Islam dalam menjelaskan inkonsistensi pengaruh belanja subsidi dan bantuan sosial terhadap kemiskinan di Indonesia. Pendekatan ini memperkaya studi sebelumnya yang masih didominasi oleh perspektif ekonomi konvensional.

Berdasarkan pemaparan yang telah disebutkan di atas, adapun permasalahan yang akan diteliti yaitu apakah belanja subsidi dan belanja bantuan sosial berpengaruh terhadap kemiskinan di Indonesia tahun 2005-2024 dalam perspektif ekonomi Islam. Dengan demikian, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh belanja subsidi dan belanja bantuan sosial terhadap kemiskinan di Indonesia tahun 2005 dan 2024 dari sudut pandang ekonomi Islam.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menerapkan pendekatan kuantitatif dengan lokasi penelitian di Indonesia selama periode 2005–2024. Variabel independen yang dijelaskan terdiri atas belanja subsidi dan belanja bantuan sosial, sedangkan variabel dependen yang diuji adalah kemiskinan. Data yang digunakan bersumber dari publikasi resmi Badan Pusat Statistik dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Teknik analisis menggunakan regresi linier berganda dan perangkat lunak E-views 9 digunakan untuk mengolah data.

Populasi dan Sampel

Populasi dari penelitian ini adalah seluruh data tahunan belanja subsidi, belanja bantuan sosial (Bansos) yang diambil dari APBN, dan persentase penduduk miskin di Indonesia dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2024. Sampel dari penelitian ini sebanyak 20 observasi (*time series*) sampel penelitian terdiri dari kemiskinan, belanja subsidi dan belanja bantuan sosial di Indonesia tahun 2005-2024. Penelitian ini menggunakan metode sampling jenuh dalam penentuan sampel, yaitu metode pengambilan sampel di mana seluruh anggota populasi dijadikan sebagai sampel penelitian.

Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data menggunakan studi dokumentasi, yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan secara tidak langsung terhadap subjek penelitian, melainkan melalui penelusuran berbagai dokumen yang relevan. Penelitian ini tidak melibatkan pengumpulan data melalui survei lapangan. Data yang digunakan berasal dari data statistik runtun waktu (*time series*) yang telah dipublikasikan oleh lembaga resmi terkait. Dalam penelitian ini, data diperoleh melalui proses penelusuran, pengunduhan, serta pencatatan berbagai laporan publikasi yang tersedia pada situs resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS) serta Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan. Data yang didokumentasikan dalam penelitian ini mencakup data tahunan yang berkaitan dengan variabel belanja subsidi, belanja bantuan sosial, serta persentase penduduk miskin di Indonesia selama kurun waktu pengamatan tahun 2005-2024.

Definisi dan Operasional Variabel Penelitian

Definisi operasional variabel disusun dengan memadukan prinsip-prinsip ekonomi Islam sebagai dasar kerangka teoritis:

1. Kemiskinan (Y)

Kemiskinan merupakan kondisi ketika individu atau kelompok tidak memiliki kemampuan ekonomi yang memadai untuk memenuhi kebutuhan dasar, termasuk kecukupan pangan, hunian yang layak, akses pendidikan, serta layanan kesehatan. Ekonomi Islam menekankan bahwa setiap individu memiliki hak atas keadilan sosial dan akses terhadap sumber daya yang memadai. (Ismail et al., 2023).

2. Belanja Subsidi (X_1)

Belanja subsidi didefinisikan sebagai pengeluaran negara dalam bentuk dana yang diberikan kepada produk atau sektor tertentu untuk mengurangi beban biaya bagi konsumen. Subsidi ini dapat mencakup berbagai bidang seperti energi, pangan, pendidikan, dan kesehatan. Hal ini berkaitan dengan prinsip maqasid syariah, di mana tujuan dari hukum Islam adalah untuk menjamin kesejahteraan umat dan menghapuskan kemiskinan (Sunarya & Rusydiana 2022).

3. Belanja Bantuan Sosial (X_2)

Belanja bantuan sosial adalah pengeluaran oleh pemerintah yang meliputi berbagai program yang dirancang untuk mendukung individu dan keluarga yang berada dalam kondisi ekonomi yang sulit. Dalam ekonomi Islam, belanja bansos berfungsi untuk memastikan adanya distribusi yang adil dari kekayaan dan sumber daya, serta untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat (Ascarya, 2021).

Berdasarkan pengertian tersebut, selanjutnya dapat dirumuskan definisi operasional dari setiap variabel yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut.

Tabel 1

Definisi Operasional Variabel

Variabel	Indikator Pengukuran	Skala
Kemiskinan	1. Penduduk Miskin 2. Presentase penduduk miskin 3. Garis kemiskinan	Rasio
Belanja Subsidi	1. Realisasi belanja subsidi 2. Subsidi perkapita 3. Proporsi subsidi 4. Subsidi energi/non-energi	Rasio
Belanja Bantuan Sosial	1. Realisasi belanja bansos 2. Bansos perkapita 3. Proporsi bansos 4. Bansos perprogram	Rasio

Teknik Analisis Data

Analisis dilakukan dengan data time series digunakan untuk penelitian ini melalui pendekatan estimasi *Ordinary Least Square* (OLS) (Widarjono, 2013). Dalam penelitian ini, variabel belanja bantuan sosial dan belanja subsidi ditransformasikan ke dalam bentuk logaritma natural (Ln). Dalam penelitian ini, variabel belanja bantuan sosial dan belanja subsidi ditransformasikan ke dalam bentuk logaritma natural (Ln). Transformasi tersebut bertujuan untuk menyederhanakan interpretasi koefisien regresi, mengurangi potensi heteroskedastisitas, serta menstabilkan varians data. Dengan demikian, model empiris dapat dinyatakan dalam bentuk persamaan sebagai berikut:

$$PPM_t = a + b_1 \ln BS_t + b_2 \ln BBS + \varepsilon$$

Di mana PPM menyatakan kemiskinan (persentase penduduk miskin), BS adalah belanja subsidi dan BBS adalah belanja bantuan sosial serta Ln adalah logaritma natural. Variabel yang dijelaskan berada dalam cakupan penelitian Indonesia pada periode pengamatan (t). Selanjutnya dalam pengolahan data menggunakan metode regresi linier berganda, terdapat beberapa tahap yang perlu dilakukan secara sistematis sebelum memperoleh hasil analisis.

Uji Asumsi Klasik

Uji Multikolinieritas

Ketika beberapa variabel independen dimasukkan ke dalam model regresi, maka dilakukan uji multikolinieritas. Dalam model regresi, multikolinieritas menunjukkan hubungan linier antara variabel independen (Widarjono, 2022). Nilai Variance Inflation Factor (VIF) dapat digunakan untuk mengidentifikasi keadaan ini. Hipotesis nol (H_0) diterima yang menyatakan bahwa model tidak mengalami multikolinieritas jika nilai VIF kurang dari 10. Sebaliknya, jika nilai VIF lebih dari 10 maka H_0 ditolak, yang menunjukkan bahwa model regresi memiliki masalah multikolinieritas.

Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menilai apakah data, khususnya residual dalam suatu model, khususnya residual dalam suatu model mengikuti pola distribusi normal. Dalam uji Jarque-Bera, keputusan diambil dengan membandingkan nilai probabilitas yang dihasilkan dengan tingkat signifikansi (α) sebesar 5%. Residual dinyatakan berdistribusi normal apabila probabilitas Jarque-Bera lebih besar dari α , sedangkan jika nilai probabilitas Jarque-Bera lebih kecil dari α , maka residual dianggap tidak memenuhi asumsi normalitas.

Uji Heteroskedastisitas

Tujuan dari uji heteroskedastisitas adalah untuk mengetahui apakah varians residual dalam model regresi bersifat homogen atau mengalami perbedaan antar pengamatan. Pengujian ini menjadi aspek penting dalam evaluasi kelayakan model, karena keberadaan heteroskedastisitas dapat menyebabkan hasil pengujian statistik, khususnya uji t dan uji F menjadi bias dan tidak dapat diandalkan (Widarjono, 2022). Keputusan pengujian ditentukan berdasarkan nilai probabilitas yang dihasilkan, di mana (H_0) ditolak apabila nilai prob $< 0,05$ menandakan adanya heteroskedastisitas. Sebaliknya, jika nilai prob $> 0,05$ maka H_0 diterima sehingga dapat dipastikan bahwa tidak mengandung heteroskedastisitas dalam model tersebut.

Uji Autokorelasi

Autokorelasi merujuk pada adanya hubungan antar nilai pengamatan dalam satu variabel yang sama. Keberadaan autokorelasi menyebabkan metode Ordinary Least Squares (OLS) tidak lagi menghasilkan estimator yang bersifat BLUE, melainkan hanya memenuhi kriteria Linear Unbiased Estimator (LUE) (Widarjono, 2018). Penentuan ada atau tidaknya autokorelasi dilakukan dengan nilai probabilitas F hitung dibandingkan dengan tingkat signifikansi (α) sebesar 5%. Jika nilai Prob. F hitung lebih besar dari α , maka (H_0) diterima, yang berarti tidak terdapat autokorelasi. Jika nilai Prob. F hitung lebih kecil

dari α , maka H_0 ditolak yang mengindikasikan adanya autokorelasi.

Uji Hipotesis

Uji Parsial (Uji t)

Tujuan dari uji t adalah untuk menguji koefisien regresi secara parsial (Widarjono, 2018). Kriteria uji-t menyatakan bahwa H_0 ditolak jika nilai probabilitas t-statistik kurang dari ambang batas signifikansi, yang menunjukkan bahwa variabel independen memengaruhi variabel dependen dalam model. Di sisi lain, H_0 diterima jika nilai probabilitas t-statistik melebihi ambang batas signifikansi, yang menunjukkan bahwa variabel independen tidak memiliki dampak pada variabel dependen dalam model.

Uji Simultan (Uji F)

Uji F atau uji simultan digunakan untuk menguji hipotesis koefisien regresi (slope) secara bersama-sama serta menilai apakah model yang digunakan layak atau tidak dalam menjelaskan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen (Basuki, 2018). Penentuan keputusan pada uji F dilakukan dengan ketentuan apabila nilai probabilitas F-statistik lebih kecil dari tingkat signifikansi, maka H_0 ditolak, yang berarti bahwa variabel bebas secara simultan berpengaruh terhadap variabel terikat. Sebaliknya, H_0 diterima jika nilai probabilitas F-statistik lebih besar dari tingkat signifikansi, yang menunjukkan bahwa variabel independen dan dependen tidak terpengaruh secara bersamaan.

Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) berfungsi untuk mengukur sejauh mana variabel independen secara bersamaan menjelaskan perubahan pada variabel dependen dalam suatu model penelitian. Kedekatan garis regresi yang diprediksi dengan data aktual yang diamati ditunjukkan oleh nilai R^2 . Nilai R^2 yang lebih dekat menunjukkan kemampuan model yang lebih baik untuk menjelaskan perubahan pada variabel dependen. Nilai R^2 berkisar dari 0 hingga 1, di mana semakin mendekati angka 1 menunjukkan bahwa model memiliki kemampuan penjelasan yang semakin baik terhadap variasi variabel terikat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Hasil Estimasi Regresi Linier Berganda

Berikut adalah hasil estimasi regresi linier berganda menggunakan aplikasi E-views 9:

Tabel 2

Hasil Estimasi Regresi Linier Berganda

Variabel	Coefficient	Std. Error
C	65.25179	13.29412
Belanja Subsidi	-1.176969	1.287067
Belanja Bantuan Sosial	-3.424665	0.857206

Sumber: Hasil Uji Regresi Berganda menggunakan Eviews 9, 2026

Persamaan regresi linier berganda dapat ditulis sebagai berikut dengan menggunakan hasil pemrosesan dan estimasi model regresi linier berganda:

$$PPM_t = 65.25179 - 1.176969 \text{ LnBSt} - 3.424665 \text{ LnBBS}_t$$

Pada persamaan tersebut, nilai konstanta adalah 65.25179 yang menunjukkan

bahwa jumlah penduduk miskin di Indonesia akan meningkat sebesar nilai konstanta antara tahun 2005 dan 2024 jika variabel belanja bantuan sosial dan subsidi bernilai konstan (tetap). secara statistik, variabel belanja subsidi memiliki nilai koefisien 1.176969 dengan tanda negatif, yang berarti peningkatan belanja subsidi sebesar 1 persen akan mengakibatkan penurunan kemiskinan sebesar 1,176969 persen. Variabel belanja bantuan sosial memiliki nilai koefisien 3.424665 dengan tanda negatif, berarti kemiskinan akan turun sebesar 3.424665 persen jika pengeluaran bantuan sosial meningkat sebesar 1 persen, dengan asumsi semua faktor lain tetap sama.

Hasil Uji Asumsi Klasik

Hasil Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi terbentuk adanya korelasi tinggi atau sempurna antar variabel bebas (independen).

Tabel 3

Hasil uji multikolinieritas

Variabel	Centered VIF
C	NA
Belanja Subsidi	1.423985
Belanja Bantuan Sosial	1.423985

Sumber: Hasil Uji multikolinieritas menggunakan Eviews 9, 2026

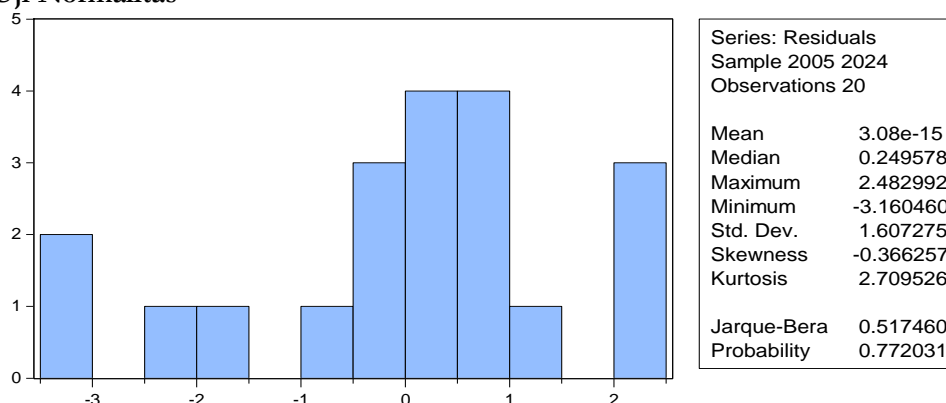
Berdasarkan hasil uji multikolinieritas, multikolinieritas tidak terjadi atau H_0 dapat diterima karena nilai VIF kedua variabel kurang dari 10.

Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk menilai apakah residu yang telah distandarisasi dalam model regresi memiliki distribusi normal atau tidak.

Gambar 4

Hasil Uji Normalitas



Sumber: Hasil Uji Normalitas menggunakan Eviews 9, 2026

Berdasarkan hasil pengujian normalitas, nilai probabilitas yang diperoleh sebesar $0,772031 > 0,05$. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa H_0 diterima, sehingga data pada model regresi linier berganda dengan metode OLS telah berdistribusi normal.

Hasil Uji Heteroskedastisitas

Diperlukan uji heteroskedastisitas untuk memastikan apakah terdapat penyimpangan dari asumsi klasik atau tidak.

Tabel 4**Hasil uji heteroskedastisitas****Heteroskedasticity Test: White**

Obs* R-Squared	Prob. Chi-Square (5)
8.984723	0.1097

Sumber: Hasil Uji Heteroskedastisitas menggunakan eviews 9, 2026

Dalam model persamaan regresi linier dengan OLS, H_0 diterima atau tidak mengandung masalah heteroskedastisitas, hasil uji heteroskedastisitas Nilai probabilitas chi-square yang diperoleh adalah 0,1097, di mana angka ini lebih besar dari $\alpha = 5\%$. Dalam model persamaan regresi linier dengan OLS, H_0 diterima atau tidak mengandung masalah heteroskedastisitas.

Hasil Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi merupakan pengujian dengan tujuan untuk mengetahui adanya hubungan antara satu residual observasi dengan observasi lainnya dalam model regresi.

Tabel 5**Hasil uji autokorelasi****Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:**

Obs* R-Squared	Prob. Chi-Square (2)
0.047946	0.9763

Sumber: Hasil Uji Autokorelasi menggunakan eviews 9, 2026

Hasil autokorelasi dari uji Breusch-Godfrey menunjukkan bahwa jika nilai Prob.Chi-Square lebih besar dari $\alpha = 5\%$, atau 0,9763, maka H_0 diterima dan H_1 ditolak, yang berarti model tersebut tidak memiliki masalah autokorelasi.

Uji Hipotesis**Uji t (Parsial)**

Uji parsial Uji parsial merupakan pengujian yang dilakukan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.

Tabel 6**Hasil Uji t (Parsial), Uji F (Simultan) dan Koefisien Determinasi (R²)**

Variabel	t-Statistic	Prob.
C	4.908319	0.0001
Belanja Subsidi	-0.914458	0.3733
Belanja Bantuan Sosial	-3.995148	0.0009
F-statistik	14.79838	
Prob(F-statistik)	0.000190	
R-squared	0.635168	

Sumber: Eviews 9 (Data di olah 2026)

Hasil menunjukkan bahwa nilai t-statistik variabel belanja subsidi (BS) memiliki nilai probabilitas $0,3733 > \alpha (0,05)$. Ini menunjukkan bahwa BS tidak berpengaruh terhadap kemiskinan. Nilai probabilitas untuk variabel belanja bantuan sosial (BBS) adalah $0,0009 < \alpha (0,05)$. Ini menunjukkan bahwa BBS kemiskinan berpengaruh terhadap kemiskinan.

Hasil Uji F (Simultan)

Uji simultan dilakukan untuk menilai pengaruh variabel independen terhadap

variabel dependen secara bersama – sama. Berdasarkan hasil, nilai probabilitas F-statistik adalah $0.000190 < \alpha = 0,05$. Dapat disimpulkan bahwa pengeluaran bantuan sosial dan pengeluaran subsidi memiliki dampak simultan terhadap kemiskinan di Indonesia.

Koefisien Determinasi (R^2)

Uji R^2 untuk Untuk menentukan apakah variabel independen dapat menjelaskan variabel dependen secara memadai. Di dapatkan R-Squared atau koefisien determinasi dengan nilai 0,635168, Nilai tersebut menunjukkan bahwa kemiskinan dapat dijelaskan oleh variabel Belanja subsidi dan belanja bantuan sosial sebesar 63% pada model penelitian. Sedangkan sisanya 37% oleh variabel di luar model penelitian.

Pembahasan

Pengaruh Belanja Subsidi terhadap Kemiskinan di Indonesia

Berdasarkan hasil regresi, variabel subsidi belanja secara statistik tidak mempunyai pengaruh terhadap kemiskinan di Indonesia tahun 2005-2024. Dari segi ekonomi, tanda negatif pada koefisien belanja subsidi menyebabkan penurunan kemiskinan. Koefisien belanja subsidi yang bernilai negatif menandakan bahwa peningkatan alokasi subsidi secara arah memiliki kecenderungan untuk menekan tingkat kemiskinan di Indonesia. Meskipun demikian, pengaruh tersebut belum menunjukkan signifikansi, yang terjadi akibat penyaluran subsidi yang masih belum sepenuhnya tepat sasaran, sehingga sebagian manfaatnya masih lebih banyak diterima oleh rumah tangga nonmiskin. Dalam perspektif Islam, kondisi ini mencerminkan belum optimalnya distribusi amanah dan keadilan kepada masyarakat miskin. Teori Nurkse mengemukakan bahwa subsidi dilihat sebagai alat yang dirancang bukan hanya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tetapi juga untuk memperbaiki ketimpangan ekonomi dan mengurangi kemiskinan. Salah satu pilar dari teori Nurkse adalah bahwa belanja subsidi dapat mengurangi kemiskinan dengan memberikan dukungan langsung kepada kelompok berisiko. Subsidi dipahami dalam teori Nurkse sebagai transfer bantuan dari pemerintah kepada individu atau sektor tertentu untuk merangsang kegiatan ekonomi yang diinginkan dan memperbaiki kesejahteraan sosial (Sabila et al., 2025).

Namun, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa belanja subsidi belum bisa mengentaskan kemiskinan di Indonesia secara statistik. Hal ini diperkuat dengan penelitian yang di lakukan sebelumnya oleh (Sari et al., 2025) serta (Islami Sari & Marissa, 2023) yang meneliti tentang subsidi, bahwa subsidi tidak berdampak signifikan terhadap kemiskinan. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menilai bahwa pelaksanaan program penyaluran pada tahun 2014 belum berjalan secara optimal, karena masih ditemukan berbagai kendala, terutama terkait basis penerima data manfaat yang belum diperbarui serta prosedur pengujian mutu beras yang belum memiliki standar yang jelas. Subsidi dirancang untuk membantu rumah tangga dalam jangka pendek, seperti meningkatkan daya beli penduduk. Ditemukan bahwa rumah tangga berpenghasilan rendah dan tinggi dapat membeli dan menikmati barang-barang bersubsidi (Nugroho et al., 2021), sehingga sebagian besar subsidi dinikmati oleh kelas menengah, yang membuatnya kurang efektif dalam mengurangi kemiskinan.

Dalam perspektif ekonomi Islam, kondisi tersebut belum sesuai dengan maqasyid syariah, terutama pada prinsip al-'adl (keadilan) dan hizf al-mal (penjagaan harta), karena alokasi dana publik yang dikhususkan kepada masyarakat miskin belum mampu mewujudkan kemaslahatan secara maksimal. Oleh karena itu, inti permasalahannya tidak

terletak pada jumlah subsidi yang diberikan, melainkan pada sistem penyaluran yang belum merefleksikan nilai amanah dan keadilan. Keadaan ini mencerminkan bahwa kemaslahatan belum terwujud secara maksimal, sehingga peran subsidi dalam mengurangi kemiskinan menjadi kurang optimal. Meskipun pemberian subsidi dianggap memiliki dampak langsung pada perekonomian nasional, hal ini justru menimbulkan ketergantungan tanpa memberikan solusi jangka panjang (Yusuf, 2018). Hal ini sering kali membuat subsidi hanya menjadi bantuan sementara tanpa mendorong pengembangan kapasitas ekonomi warga negara.

Penelitian ini menyarankan agar pemerintah perlu fokus pada implementasi kebijakan distribusi subsidi, seperti subsidi LPG, subsidi listrik, dan subsidi bahan bakar ke daerah-daerah regional untuk mengurangi kesenjangan dan pengangguran (Nugroho et al., 2021). Survei oleh Indonesian Political Indicators (IPI) menemukan bahwa mayoritas responden setuju bahwa subsidi bahan bakar salah sasaran, seperti yang dibahas dalam penelitian (Astuti et al., 2023). Pemerintah perlu mengurangi subsidi yang mendistorsi, terutama subsidi bahan bakar, mengubah paradigma subsidi, menciptakan strategi mitigasi risiko, dan mengalokasikan kembali dana untuk pengeluaran pemerintah yang bermanfaat bagi masyarakat miskin (Sari et al., 2025). Penelitian (Sambodo & Novandra, 2019) menyarankan bahwa subsidi untuk transportasi umum harus diprioritaskan daripada subsidi energi, karena subsidi energi telah ditemukan menyebabkan lebih banyak masalah.

Pengaruh Belanja Bantuan Sosial terhadap Kemiskinan di Indonesia

Berdasarkan hasil estimasi regresi, variabel belanja bantuan sosial memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Indonesia tahun 2005-2024. Dalam perspektif ekonomi Islam, pengaruh negatif dan signifikan menegaskan terlaksananya prinsip keadilan distributif, di mana negara menyalurkan anggaran untuk mengurangi kemiskinan secara berkelanjutan. Sesuai dengan teori kemiskinan, model kemiskinan menunjukkan bahwa belanja bantuan sosial secara statistik memengaruhi kemiskinan dan memiliki arah koefisien negatif, yang mengindikasikan bahwa tingkat kemiskinan akan menurun seiring dengan meningkatnya pengeluaran bantuan sosial. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan teori pengeluaran pemerintah Keynes yang dikutip dalam (Tungka et al., 2024), yang menjelaskan keterkaitan antara pengeluaran pemerintah dan tingkat kemiskinan yang sangat kuat. Secara teoritis, pengeluaran pemerintah yang efektif, khususnya dalam bentuk belanja sosial, pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan, diharapkan mampu menurunkan tingkat kemiskinan. Dalam teori ekonomi kesejahteraan (welfare economics), bantuan sosial dipandang sebagai mekanisme redistribusi pendapatan dari kelompok berpendapatan tinggi kepada kelompok berpendapatan rendah untuk memperbaiki ketimpangan dan meningkatkan kesejahteraan sosial.

Hal ini menunjukkan bahwa belanja bantuan sosial yang dilaksanakan pemerintah selama periode 2005–2024 memiliki peran strategis dalam menekan tingkat kemiskinan di Indonesia. Kondisi tersebut dipicu oleh beragam program bantuan, seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang secara langsung menyalurkan bantuan kepada masyarakat miskin. Dalam upaya menurunkan angka kemiskinan, Program Keluarga Harapan (PKH) berupaya meringankan dan mendukung rumah tangga yang sangat miskin dalam memperoleh akses ke layanan kesehatan dan pendidikan (Sasmita et al., 2023). Selain bantuan itu, melalui penyediaan sumber pendapatan tambahan, program sosial membantu rumah tangga miskin memenuhi kebutuhan pokok seperti sandang, pangan, dan papan. Di sisi lain, perhatian terhadap akses pendidikan dan layanan kesehatan

melalui Program Indonesia Pintar (PIP) dan Kartu Indonesia Sehat (KIS) bertujuan membangun dasar yang kokoh bagi individu untuk meningkatkan keterampilan serta produktivitas, sekaligus membuka kesempatan bagi mereka untuk keluar dari jerat kemiskinan. Dalam perspektif islam, hasil ini menegaskan bahwa negara telah menjalankan keadilan distributif sesuai syariah melalui bantuan sosial yang tepat sasaran kepada masyarakat miskin. Program seperti PKH, BPNT, PIP, dan KIS juga mencerminkan *maqashid syariah*, terutama *hifz al-nafs* melalui penyediaan kebutuhan dasar, *hifz al-aql* melalui akses pendidikan, dan *hifz al-mal* melalui perlindungan stabilitas ekonomi rumah tangga miskin. Oleh karena itu, bantuan sosial tidak hanya menekan kemiskinan, tetapi juga menjadi bentuk amanah negara untuk mewujudkan falah dan kesejahteraan yang adil.

Hasil ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh (Waqas et al., 2022) serta (Pausan et al., 2024) Menyatakan bahwa belanja bantuan sosial berpengaruh negatif dan signifikan dalam mengurangi kemiskinan.

Pengaruh Belanja Subsidi dan Belanja Bantuan Sosial terhadap Kemiskinan di Indonesia dalam Perspektif Ekonomi Islam

Berdasarkan hasil estimasi regresi, variabel belanja subsidi dan belanja bantuan sosial secara bersama-sama (simultan) berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Indonesia. Artinya dapat disimpulkan bahwa variabel independen (variabel bebas) secara bersama-sama mampu menjelaskan perubahan yang terjadi pada variabel dependen (variabel terikat). Hal ini sejalan dengan prinsip dasar ekonomi Islam yang menempatkan kesejahteraan (falah) dan kesejahteraan distribusi sebagai tujuan utama pembangunan ekonomi. Dalam kerangka ekonomi Islam, peran negara tidak hanya sebagai regulator, tetapi juga sebagai penjamin terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat, terutama kelompok lemah dan miskin. Belanja subsidi dan bantuan sosial dapat dipahami sebagai bentuk nyata dari konsep takaful ijtimai' (jaminan sosial) dalam Islam. Negara menjamin setiap individu memperoleh akses terhadap kebutuhan pokok seperti pangan, pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan. Dalam perspektif ekonomi Islam, belanja publik idealnya diarahkan untuk mencapai masalah (kemaslahatan umum), keadilan distributif, dan peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat (Arham et al., 2024). Ibnu Hazm, dalam pandangannya, tanggung jawab orang kaya tidak berhenti pada zakat saja, melainkan juga mencakup kewajiban sosial lain yang harus dilakukan, khususnya mereka yang lemah seperti fakir, miskin, dan anak yatim. Konsep ini pada masa kini dapat dipahami sebagai konsep pengentasan kemiskinan.

Dalam perspektif ekonomi Islam, kemiskinan tidak hanya dipandang sebagai masalah pendapatan, namun juga sebagai kegagalan distribusi. Al-Qur'an menegaskan larangan agar harta tidak beredar di kalangan orang kaya saja. Allah berfirman dalam surah Al-Hasyr:7

مَا آفَاءَ اللَّهِ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَالرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: “*Apa saja (harta yang diperoleh tanpa peperangan) yang dianugerahkan Allah kepada Rasul-Nya dari penduduk beberapa negeri adalah untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak yatim, orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan. (Demikian) agar harta itu tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu terimalah. Apa yang dilarangnya bagimu tinggalkanlah. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukuman-Nya*”. (QS Al-Hasyr Ayat 7)

Ayat ini menekankan pentingnya redistribusi kekayaan dalam masyarakat, di mana

kekayaan tidak hanya berputar di kalangan orang-orang kaya, tetapi juga harus sampai kepada yang kurang mampu. Prinsip bantuan ini menegaskan bahwa kebijakan fiskal, termasuk belanja subsidi dan belanja bantuan sosial, berfungsi sebagai instrumen redistribusi kekayaan. Melalui subsidi, harga barang dan jasa esensial menjadi lebih terjangkau, sedangkan melalui bantuan sosial, kelompok rentan memperoleh tambahan sumber daya untuk memenuhi kebutuhan dasar dan meningkatkan produktivitas.

Hasil ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (T. N. Sari et al., 2025) dan (Islami Sari & Marissa, 2023) yang menjelaskan bahwa subsidi dan bantuan sosial secara simultan (secara bersamaan) memiliki pengaruh terhadap kemiskinan.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa secara parsial belanja subsidi tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan bahkan menunjukkan angka positif. Sedangkan belanja bantuan sosial secara parsial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan. Secara simultan belanja subsidi dan belanja bantuan sosial berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Indonesia, dengan kemampuan model penjelasan sebesar 63%. Dalam perspektif ekonomi Islam, hasil ini menegaskan pentingnya peran negara dalam mewujudkan falah melalui kebijakan fiskal yang berorientasi pada keadilan distributif dan masalah. Belanja publik dipahami sebagai implementasi konsep *takaful ijtima'i* (jaminan sosial), di mana negara menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat serta mencegah agar harta tidak hanya beredar di kalangan orang kaya.

Penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas cakupan dan diharapkan dapat mengembangkan kajian lain dengan menambahkan variabel-variabel makroekonomi dan sosial lainnya yang berpotensi memengaruhi tingkat kemiskinan, seperti pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran, inflasi, indeks pembangunan manusia (IPM), tingkat pendidikan, serta peran instrumen ekonomi Islam seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf produktif, sehingga kemampuan model dalam menjelaskan variasi kemiskinan dapat ditingkatkan.

REFERENCES

- Adegboyo, O. S. (2020). Does government spending reduce poverty in Nigeria ? Evidence from Auto- Regressive Distributed Lag Specification. *Ekonomi Bisnis*, VII(1998), 86–90. <https://doi.org/https://doi.org/10.17977/um042v25i1p14-25>
- Akbar, A. (2021). Pengaruh Petumbuhan Ekonomi Human Development Index Dan Penanaman Modal Asing Terhadap Kemiskinan Di 5 Negara Asean. *Abstract of Undergraduate Research*.
- Alamanda. (2020). The Effect of Government Expenditure On Income Inequality And Poverty In Indonesia. *Info Artha*, 4(01), 1–11. <https://doi.org/https://doi.org/10.31092/jia.v4i1.614>
- Alwi, A. C. (2023). Peran literasi ekonomi dan impresi masyarakat dalam menghadapi ancaman resesi ekonomi. *Equilibrium:Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Pembelajarannya*, 1(11), 12–19. <https://doi.org/10.25273/equilibrium.v1i11.14346>
- Anderson, E., Ana, M., Duvendack, M., & Esposito, L. (2018). Does Government Spending Affect Income Poverty ? A Meta-regression Analysis. *World Development*, 103, 60–71. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2017.10.006>
- Ascarya. (2021). The role of Islamic social finance during Covid-19 pandemic in Indonesia's economic recovery. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and*

Management, 15(2), 386–405. <https://doi.org/https://doi.org/10.1108/imefm-07-2020-0351>

- Astuti, A. B., Guci, A. N., Iqbal, V., Alim, A., & Azizah, L. N. (2023). Non Hierarchical K-Means Analysis To Clustering Priority Distribution Of Fuel Subsidies In Indonesia. *Barekeng: Journal of Mathematics and Its Applications*, 17(3), 1663–1672. <https://doi.org/https://doi.org/10.30598/barekengvol17iss3pp1663-1672>
- Basuki, A. T. (2018). *Ekonometrika Pengantar Dilengkapi Penggunaan Eviews* (Edisi Pert). Danisa Media.
- Habibah, A. N., Abdul, R., Erike, G., & Anas, A. (2020). Peran Kebijakan Fiskal Islam Dalam Mengentas Kemiskinan Melalui Program Keluarga Harapan. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(02), 251–258. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v6i2.1014>
- Hoekman, B. (2020). WTO Reform Priorities post-COVID-19. *SSRN Electronic Journal*, 24(4), 337–348. <https://doi.org/https://doi.org/10.2139/ssrn.3766571>
- Islami Sari, D., & Marissa, F. (2023). Pengaruh Belanja Subsidi, Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial terhadap Kemiskinan di Indonesia. *Indo-Fintech Intellectuals: Journal of Economics and Business*, 3(2), 346–359. <https://doi.org/10.54373/ifijeb.v3i2.238>
- Ismail, M. H., Imtikhanah, S., Andayani, T. D., & Lutfiani, A. P. (2023). Pengaruh Alokasi Anggaran Bidang Penanggulangan Fakir Miskin Dan Alokasi Anggaran Kesejahteraan Sosial Terhadap Kinerja Dinas Sosial Pemerintahan Daerah Se- Jawa Tengah Tahun 2019-2022. *Jurnal Neraca Volume*, 19(2), 87–103. <https://doi.org/https://doi.org/10.48144/neraca.v19i2.1688>
- Khomsan, A., H. Dharmawan, A., Saharuddin, Sukandar, D., & Syarief, H. (2015). *Indikator Kemiskinan dan Misklasifikasi Orang Miskin*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Magdalena, S., Cynta, L., & Katup, M. (2024). God’s Protection in the Post-Pandemic Phenomenon of Extreme Poverty in Indonesia. *Jurnal Ilmiah Teologi Dan Pendidikan Kristen*, 2(1), 1–13. <https://doi.org/https://doi.org/10.61404/juitak.v2i1.166>
- Mankiw, NG, Quah, E., & Wilson, P. (2020). *Prinsip-prinsip ekonomi: Edisi Asia* (edisi ke-3). Cengage Learning Asia.
- Normasyhuri, K., Suryanto, T., & Prayoga, R. (2022). Dampak Dana Desa Terhadap Kemiskinan Dengan Pendekatan Indikator Sustainable Development Goals (SDGs) : Tinjauan Ekonomi Islam. *RELASI Jurnal Ekonomi*, 18(2), 173–185. <https://doi.org/https://doi.org/10.31967/relasi.v18i2.589>
- Nugroho, Danesta Febianto Wicaksono, R. B., & Reynaldi, M. R. (2021). Economics and Finance in Indonesia Special Allocation Fund and Poverty Rate in Indonesia. *Economics and Finance in Indonesia*, 67(2), 257–269. <https://doi.org/10.47291/efi.v67i2.811>
- Nunes, R. D. C. (2024). Brazilian Fiscal And Monetary Policy : Balancing Budgetary Rigidity And Economic Sustainability. *Iosr Journal of Business and Management*, 26(11), 57–69. <https://doi.org/10.9790/487X-2611085769>
- Nurias, N., Johari, S. M., Muljarijadi, B., & Wardhana, A. (2023). Reducing the provincial poverty rate in Indonesia: The impact of local government expenditure. *Jurnal Ekonomi & Studi Pembangunan*, 24(2), 297–315. <https://doi.org/10.18196/jesp.v24i2.18618>
- Pausan, Ramli, B., & Bato, A. R. (2024). The Impact of Fiscal Policy on Poverty in Indonesia. *Bulletin of Economic Studies (BEST)*, 4(3), 167–181. <https://doi.org/Dampak kebijakan fiskal terhadap kemiskinan di Indonesia>
- Piffaut, P. V, Ph, D., & Colther, C. (2022). Do Public Expenditure and Subsidies have an Impact on Chile ’ s GDP? *Account and Financial Management Journal*, 7(07), 2848–2860. <https://doi.org/10.47191/afmj/v7i7.07>

- Putra, N. H. and Anzaikhan, M. (2022). Implementasi kebijakan program jaring pengaman sosial (jps) dalam penanggulangan kemiskinan di era pandemi covid-19. *Al-Ijtima' International Journal of Government and Social Science*, 8(1), 39–56. <https://doi.org/https://doi.org/10.22373/jai.v8i1.1757>
- Priseptian, L., & Primandhana, W. P. (2022). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan. *Forum Ekonomi*, 24(1), 45–53. <https://doi.org/https://doi.org/10.30872/jfor.v24i1.10362>
- Rahman, A., & Siradjuddin, S. (2020). Islamic Economic Concept in Poverty Alleviation. *Journal of Asian Multicultural Research for Economy and Management Study*, 1(2), 67–74. <https://doi.org/10.47616/jamrems.v1i2.68>
- Rossa, A., & Ananda, C. F. (2024). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Belanja Bantuan Sosial, Dan Belanja Pendidikan Terhadap Kemiskinan. *Journal of Development Economic and Social Studies*, 3(3), 803-813. <https://doi.org/10.21776/jdess.2024.03.3.11>
- Riyanta, S. (2018). Strategi Tata Kelola Kolaboratif Antara Aktor Pemerintah Dan Non Pemerintah Dalam Pengentasan Kemiskinan. *Jurnal Analis Kebijakan*, 2(2). <https://doi.org/10.37145/jak.v2i2.35>
- Sabila, A. S., Putri, D. S., & Sitorus, D. F. (2025). Analysis of the Effect of Energy Subsidies on State Expenditures and Fiscal Security in Indonesia. *Proceedings of Economics Business Innovation & Creativity*, 2(6), 436–441. <https://doi.org/https://doi.org/10.32493/ebic.v2i1.51046>
- Saeed, M. K., & Hayat, M. A. (2020). The Impact of Social Cash Transfers on Poverty in Pakistan—A Case Study of Benazir Income Support Programme. *Munich Personal RePEc Archive Paper Series*, 99805. <https://doi.org/https://mpra.ub.uni-muenchen.de/id/eprint/99805>
- Sambodo, MT, & Novandra, R. (2019). Kondisi kemiskinan energi di Indonesia dan dampaknya terhadap kesejahteraan. *Kebijakan Energi*, 132, 113–121. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.enpol.2019.05.029>
- Sari, N. I. (2018). Determinan Tingkat Kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007 – 2014. *Economics Development Analysis Journal*, 7(2), 128–136. <https://doi.org/https://doi.org/10.15294/edaj.v8i2.23411>
- Sari, T. N., Fitriani, F., Nurherlina, N., & Rusgianto, S. (2025). Determinants of Poverty Reduction in Indonesia: Evidence from Islamic Social Finance, Islamic Microfinance Institutions, and Government Interventions. *Review of Islamic Economics and Finance*, 8(1), 167–190. <https://doi.org/https://doi.org/10.17509/rief.v8i1.80447>
- Sari, VK, Cahyadin, M., Ignasiak-Szulc, A., & Ahmad, R. (2023). Threshold Levels of Poverty and Unemployment Rates on Economic Growth in Indonesia during COVID-19 Pandemic. *Jurnal Ekonomi Dan Studi Pembangunan*, 15(1). <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.17977/um002v15i12023p074>
- Sasmita, O. A., Anggraeni, E., & Hilal, S. (2023). Analisis Dana Bantuan Program Keluarga Harapan Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Di Kota Bandar Lampung. *J-MAS (Jurnal Manajemen Dan Sains)*, 8(1), 1006–1011. <https://doi.org/10.33087/jmas.v8i1.1025>
- Sayyidina, N. A., & Iranto, D. (2023). The Effect of Government Expenditure in the Education Sector , Human Development Index , and Economic Growth on Poverty Rate in Eastern Indonesia. *Journal of Business and Economics Research (JBE)*, 4(2), 186–193. <https://doi.org/10.47065/jbe.v4i2.3559>
- Shelisa, I. I., & Setyanto, A. R. (2023). Pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka Dan Tingkat

- Kemiskinan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Lampung. *Independent : Journal Of Economics*, 3, 89–100.
<https://doi.org/https://doi.org/10.26740/independent.v3i3.51896>
- Silma Lafifa Sunarya, A. S. R. (2022). Zakat Program For Post-Pandemic Economic Recovery: Qualitative Approach Using Nvivo. *Joipad: Journal of Islamic Philanthropy and Disaster*, 2(2), 28–39. <https://doi.org/https://doi.org/10.21154/joipad.v2i2.4831>
- Tungka, E. M., Maramis, M. T. H. B., & Kawung, G. M. V. (2024). Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, Pengangguran, Pertumbuhan Ekonomi, Dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, 25(2), 180–194.
<https://doi.org/https://doi.org/10.35794/jpekd.52704.25.2.2024>
- Triana, I., Asieh, Y., Siber, U. I. N., & Nurjati, S. (2025). Evolusi Pemikiran Ekonomi Islam Monzer Kahf: SLR 2020-2024. kontemp. *Jurnal Global Ilmiah*, 2(10), 730–740.
<https://doi.org/https://doi.org/10.55324/jgi.v2i10.240>
- Waqas, M Awan, M S & Sánchez-Juárez, I. (2022). Social protection expenditures , poverty , inequality , and economic growth in Pakistan. *Paradigma Económico. Revista de Economía Regional y Sectorial*, 14(1), 57–75.
<https://doi.org/https://doi.org/10.36677/paradigmaeconomico.v14i1.16747>
- Widarjono, A. (2018). *Ekonometrika Pengantar dan Aplikasinya Disertai Panduan EVIEWS* (Edisi 5). UPP STIM YKPN.
- Widarjono, A. (2022). *Ekonometrika* (Edisi Ketu). Universitas Terbuka.
- Yusuf, A. A. (2018). The Direct and Indirect Effect of Cash Transfers: The Case of Indonesia. *International Journal of Social Economics*, 45(5), 792–806.
<https://doi.org/https://doi.org/10.1108/IJSE-03-2017-0072>
- Zahid, A. R., Hassan, M. U., & Hassan, M. (2025). Political Justice in The Quran: A Study of Governance and Leadership. *Tanazur*, 06(01), 17–31.
<https://doi.org/https://tanazur.com.pk/index.php/tanazur/article/view/550>
- Zaki, Z. (2023). Government Spending , Population , and Poverty. *International Journal Of Multidisciplinary Research And Analysis*, 06(09), 4016–4022.
<https://doi.org/10.47191/ijmra/v6-i9-10>
- Zuliansyah, A., Pratomo, D., & Supriyaningsih, O. (2022). The Role Of Finance Technology (Fintech) In ZIS Management To Overcome Poverty. *Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (IIJSE)*, 5(1), 203–224.
<https://doi.org/https://doi.org/10.31538/ijse.v5i1.1794>